

2025

LAPORAN PIP



Pelayanan Informasi Publik KPK



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik KPK selama tahun 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen KPK dalam menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Sepanjang tahun 2025, KPK melalui pelayanan informasi publik terus berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas, responsif, dan inklusif. Pelayanan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik, tetapi juga diarahkan untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Laporan ini memuat gambaran umum kebijakan, pelaksanaan layanan, capaian kinerja, inovasi, serta berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang telah dilakukan KPK selama tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi internal serta bahan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan pelayanan informasi publik masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, KPK senantiasa terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan pelayanan informasi publik yang semakin prima di masa mendatang.

VISI

Memberikan pelayanan informasi dan komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

MISI

- Memenuhi hak masyarakat atas akses informasi publik KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang mudah diakses, inklusif, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Memperkuat pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi publik yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan.

MOTTO

- Melayani dengan semangat transparansi



PRINSIP PELAYANAN

Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemberantasan Korupsi diselenggarakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi
- Akuntabilitas
- Keberlanjutan
- Partisipatif
- Integritas
- Keadilan

MAKLUMAT PELAYANAN



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN

“Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, melakukan perbaikan secara berkala, dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

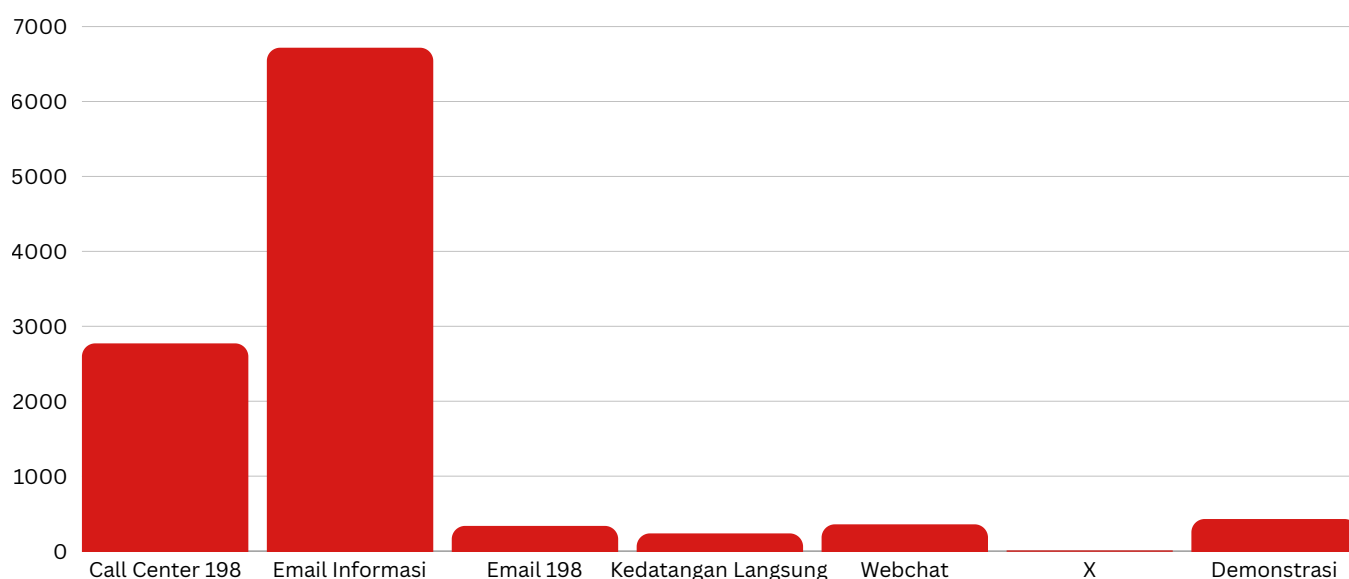
Jakarta, 03 Juni 2024

Jenderal KPK



H. Harefa

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Berdasarkan data pelayanan sepanjang tahun 2025, jumlah permohonan informasi publik yang diterima dan diselesaikan oleh pelayanan informasi publik KPK tercatat sebanyak 10.860 permohonan. Permohonan tersebut berasal dari berbagai saluran layanan yang disediakan KPK, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2025, permohonan informasi publik terdiri dari:

- 2776 - Call Center 198
- 6718- Email Informasi
- 336- Email 198
- 236 - Kedatangan Langsung
- 357 - Webchat
- 9 - X
- 428 - Unjuk Rasa

JENIS LAYANAN

01

Layanan Permintaan Informasi Publik

Meliputi permohonan informasi terkait kelembagaan, kebijakan, program, dan kinerja KPK sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

02

Layanan Pendaftaran dan Pelaporan LHKPN

Meliputi permohonan informasi terkait tata cara pendaftaran, pelaporan, serta pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

03

Layanan Penerimaan dan Konsultasi Pelaporan Gratifikasi

Meliputi permohonan informasi serta konsultasi terkait kewajiban pelaporan gratifikasi.

04

Layanan Penerimaan Laporan Masyarakat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Dumas)

Meliputi informasi seputar mekanisme dan tata cara penyampaian pengaduan masyarakat.

05

Layanan Perpustakaan

Meliputi permohonan informasi terkait koleksi, peminjaman, dan ketersediaan bahan pustaka yang berkaitan dengan isu pemberantasan korupsi

06

Layanan Pendaftaran Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas

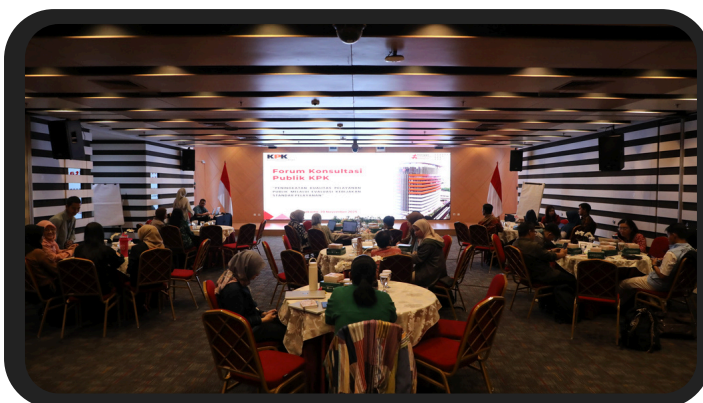
Meliputi informasi seputar pendaftaran, pelaksanaan, dan sertifikasi penyuluh antikorupsi.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Temu Unit Layanan 2025



FKP 2025



Nominasi Instansi Informatif oleh KIP

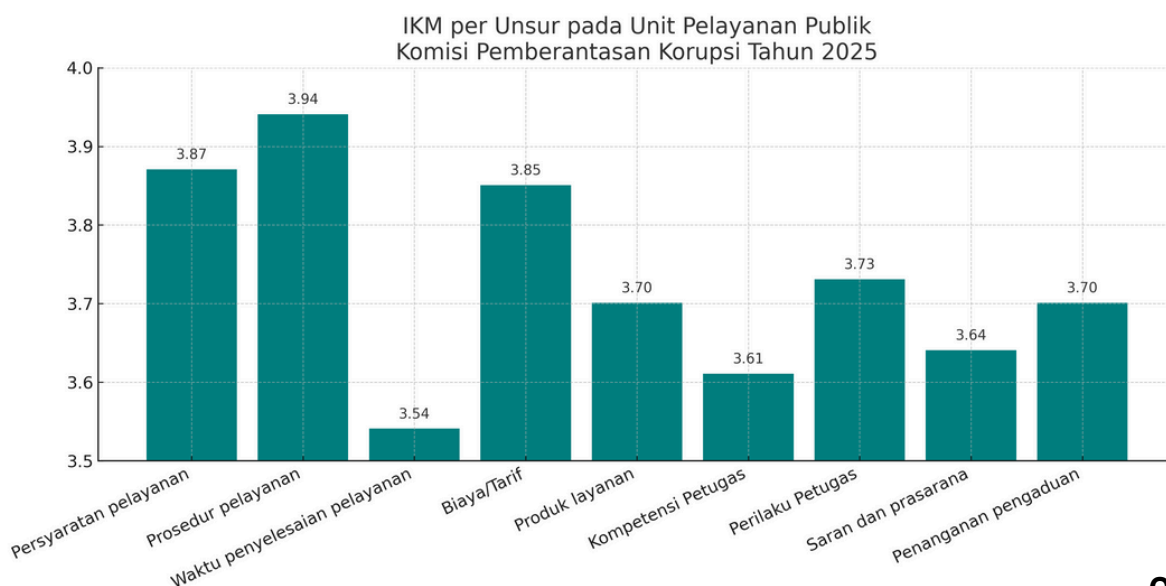


SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2025



Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan informasi publik KPK. Pelaksanaan SKM Tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengumpulan data SKM dilakukan melalui media daring dan luring kepada pengguna layanan informasi publik KPK. Berdasarkan hasil pengolahan data SKM Tahun 2025, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **92,34** dengan kategori **Sangat Baik**.



KEGIATAN PEKPPP MANDIRI



Pelaksanaan kegiatan PEKPPP diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 dan Pedoman Menteri PANRB RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif terkait kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian PANRB mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, berisi himbauan kepada setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan PEKPPP secara mandiri yang disebut dengan PEKPPP mandiri instansional.

Dalam rangka melaksanakan amanat UndangUndang dan Peraturan terkait pelayanan publik, serta guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka pada tahun 2025 KPK melalui Biro Humas selaku Koordinator Layanan Publik menyelenggarakan PEKPPP secara mandiri.

7 UNIT KERJA PEKPP MANDIRI

1. Biro Humas – Layanan Perpustakaan, mengelola layanan perpustakaan dan literasi antikorupsi
2. Direktorat PP LHKPN - Layanan pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
3. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik - Layanan penerimaan dan konsultasi pelaporan gratifikasi, mengelola pelaporan dan konsultasi pelaporan gratifikasi
4. Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat - Layanan Penerimaan Laporan Masyarakat Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi
5. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi - Layanan pendaftaran sertifikasi profesi penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas, memberikan layanan sertifikasi penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas
6. Biro Umum - Layanan ATK mengelola layanan pengadaan dan distribusi alat tulis kantor internal KPK
7. Biro SDM – Layanan EAP (Employee Assistance Program) memberikan layanan konseling pegawai KPK

HASIL PEKPPP MANDIRI

Rata-rata Indeks Pelayanan Publik ke-7 (tujuh) UPP di lingkungan KPK sebesar 4.69 dengan kategori A atau Pelayanan Prima.

DOKUMENTASI PEKPPP MANDIRI



Rapat Pleno Penilaian PEKPP Mandiri



**Bimbingan pengisian kertas kerja
kepada unit kerja**



Konsultasi pengisian F01 dan F03



Sosialisasi PEKPPP Mandiri



KEDATANGAN LANGSUNG DAN SURAT

Gedung Komisi Pemberantasan
Korupsi, Jakarta. Pelayanan hari
Senin–Jumat pukul 09.00 - 16.00



E-MAIL

Melalui alamat email resmi
Pelayanan Informasi Publik KPK
informasi@kpk.go.id



CALL CENTER 198

Call center 198 mulai melayani
masyarakat setiap hari Senin —
Jumat dari pukul 08.30 – 16:30 WIB.

SARANA PRASARANA

WEBSITE

Melalui tautan <http://ppid.kpk.go.id>
yang dapat diakses sepanjang hari
oleh Pemohon Informasi.



AKUN X PIP

X @PIP_KPK yang dapat diakses dari
hari Senin sampai Jumat pada pukul
09:00 - 16:00 WIB.



TERIMA KASIH



PPID Komisi Pemberantasan Korupsi Gedung Merah
Putih KPK Lantai D, Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta
Selatan, 12950 Indonesia